

Peningkatan Kapasitas Karang Taruna Kabupaten Barru Sebagai Mitra Pemerintah Desa Dalam Fungsi Pengawasan Pembangunan

Didin Halim¹, Aditya Sulthony Ahmad Khan², Ahmad Difa Awlia Aslim³, Tri Cahyo Nugroho⁴, Irfan. B⁵.

Universitas Negeri Makassar ¹²³⁴⁵

didinhalim@unm.ac.id

Abstract. Karang Taruna is a youth organization that plays a strategic role in supporting village development through active community participation. However, the institutional capacity and technical competencies of Karang Taruna organizations in Barru Regency still face various challenges, particularly in carrying out development oversight functions. This community service program aimed to strengthen the capacity of Karang Taruna as a partner of village governments in monitoring and supervising village development. The methods employed included socialization, training, mentoring, digital technology implementation, and the development of a sustainability strategy. The training covered organizational governance, youth leadership, participatory village development monitoring, administrative management, and the utilization of information technology for reporting and transparency. The results demonstrated an improvement in the knowledge and skills of Karang Taruna members regarding village development mechanisms, participatory monitoring practices, and systematic reporting procedures. Furthermore, the program successfully enhanced collaboration between Karang Taruna and village governments in promoting more transparent, participatory, and accountable development governance. Program sustainability was supported through the establishment of village monitoring teams, the development of institutional partnerships, and the provision of participatory development monitoring guidelines. Therefore, Karang Taruna in Barru Regency has strengthened its potential to serve as a social control agent and a strategic partner of village governments in fostering sustainable development.

Keywords: Karang Taruna, village development oversight, youth empowerment, institutional capacity, community participation, Barru Regency.

I. PENDAHULUAN

Kabupaten Barru merupakan salah satu wilayah di Provinsi Sulawesi Selatan yang memiliki karakteristik sosial dan geografis yang khas. Wilayah ini terdiri dari tujuh kecamatan dengan dominasi masyarakat yang menggantungkan hidup pada sektor pertanian, perikanan, dan perdagangan kecil (BPS Barru, 2023). Potensi sumber daya alamnya cukup besar, namun masih terdapat kesenjangan antara potensi dan realisasi pembangunan di tingkat desa

(Amira, 2022). Dalam konteks ini, keberadaan lembaga kemasyarakatan seperti Karang Taruna memiliki peran strategis dalam mendorong partisipasi pemuda desa untuk terlibat dalam pembangunan yang berkelanjutan (Istiana, 2024).

Karang Taruna sebagai organisasi sosial kepemudaan memiliki kedudukan hukum yang diatur dalam Permensos Nomor 25 Tahun 2019 tentang Karang Taruna, yang menegaskan bahwa lembaga ini merupakan wadah pengembangan generasi muda di tingkat

desa dan kelurahan dalam bidang kesejahteraan sosial (Hidayatulloh, 2022). Namun, dalam praktiknya di Kabupaten Barru, sebagian besar Karang Taruna masih menghadapi berbagai kendala baik dari aspek kapasitas kelembagaan, manajerial, maupun kemampuan teknis dalam mendukung fungsi pengawasan pembangunan desa.

Berdasarkan hasil observasi awal di beberapa desa, seperti Desa Lompo Tengah (Kecamatan Tanete Rilau) dan Desa Pancana (Kecamatan Tanete Rilau), ditemukan bahwa Karang Taruna masih cenderung berperan pasif dan belum optimal dalam menjalankan fungsi sosial dan kemitraannya dengan pemerintah desa. Kegiatan organisasi masih terbatas pada aktivitas seremonial, keagamaan, dan event sosial, sementara peran strategisnya dalam membantu pemerintah desa melakukan pengawasan pembangunan belum dijalankan secara maksimal.

Kondisi ini tidak lepas dari keterbatasan kapasitas anggota Karang Taruna, terutama dalam hal pemahaman terhadap mekanisme perencanaan dan pelaksanaan pembangunan desa, pengelolaan keuangan, serta pelaporan kegiatan berbasis data dan bukti lapangan (Prasetyo, 2025). Minimnya kemampuan dalam membaca dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) atau Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDDes) juga mengakibatkan mereka tidak mampu memberikan masukan konstruktif atau melakukan kontrol sosial terhadap proses pembangunan yang berjalan (Mukhlis & others, 2025).

Dari sisi profil mitra, sebagian besar anggota Karang Taruna di Kabupaten Barru berusia antara 18–35 tahun, dengan latar belakang pendidikan menengah hingga perguruan tinggi. Mereka memiliki semangat dan potensi sosial yang tinggi, namun belum

terfasilitasi dengan pelatihan yang tepat (Astuti et al., 2026). Secara ekonomi, banyak di antara mereka bekerja sebagai petani muda, nelayan, pedagang kecil, atau tenaga kerja informal, sehingga waktu dan sumber daya untuk pengembangan kapasitas masih terbatas. Dalam konteks kelembagaan, struktur organisasi sudah terbentuk di tingkat desa, namun tidak semua memiliki program kerja yang terarah dan terdokumentasi.

Dari sisi potensi wilayah, Kabupaten Barru memiliki peluang besar untuk membangun desa-desa mandiri melalui peningkatan peran pemuda dalam pengawasan pembangunan (Asmiani et al., 2024). Pemerintah daerah telah berupaya mendorong partisipasi masyarakat melalui program Desa Inovatif dan Desa Digital, namun belum sepenuhnya menyentuh aspek kelembagaan sosial seperti Karang Taruna. Padahal, jika diberdayakan secara optimal, Karang Taruna dapat menjadi mitra strategis pemerintah desa dalam melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pembangunan, termasuk dalam aspek transparansi penggunaan dana desa (Ramadhani et al., 2025).

Kondisi eksisting ini menunjukkan adanya kesenjangan kapasitas kelembagaan dan kemampuan teknis yang harus segera diatasi melalui kegiatan pengabdian masyarakat yang berorientasi pada peningkatan kompetensi dan partisipasi pemuda desa. Peningkatan kapasitas ini diharapkan tidak hanya memperkuat kelembagaan Karang Taruna, tetapi juga mendorong terbentuknya sinergi yang kuat antara pemerintah desa, masyarakat, dan pemuda dalam mengawal pembangunan yang partisipatif, transparan, dan akuntabel.

A. Permasalahan Mitra

Kondisi eksisting mitra menunjukkan bahwa Karang Taruna di Kabupaten Barru memiliki potensi besar namun masih menghadapi sejumlah keterbatasan. Anggota Karang Taruna umumnya berusia 18–35 tahun dengan latar belakang pendidikan menengah hingga perguruan tinggi, yang mencerminkan kapasitas intelektual dan semangat sosial yang baik (BPS Barru, 2023). Meskipun demikian, potensi ini belum sepenuhnya tersalurkan karena minimnya akses terhadap pelatihan dan pendampingan yang relevan. Dari sisi sosial ekonomi, sebagian besar anggota bekerja sebagai petani muda, nelayan, pedagang kecil, atau tenaga kerja informal yang membuat waktu dan sumber daya mereka untuk mengikuti pengembangan kapasitas menjadi terbatas. Pada aspek kelembagaan, struktur organisasi Karang Taruna telah terbentuk di tingkat desa, namun pelaksanaan program kerja masih belum terarah, kurang terdokumentasi, dan belum didukung oleh sistem administrasi yang kuat. Kondisi ini menyebabkan organisasi belum mampu berperan optimal sebagai mitra pemerintah desa.

Di sisi lain, Kabupaten Barru memiliki peluang besar untuk mendorong desa-desa menjadi mandiri melalui berbagai inisiatif pembangunan seperti program Desa Inovatif dan Desa Digital (Junaid et al., 2022). Namun, program tersebut belum banyak menyentuh lembaga sosial seperti Karang Taruna, padahal pemuda dapat memainkan peran strategis dalam pengawasan pembangunan, terutama dalam konteks transparansi dan akuntabilitas penggunaan dana desa. Dari hasil identifikasi, terlihat adanya kesenjangan kapasitas antara potensi pemuda dan kemampuan teknis yang mereka miliki. Oleh karena itu, peningkatan kompetensi

melalui kegiatan pengabdian masyarakat menjadi kebutuhan mendesak untuk memperkuat peran Karang Taruna. Penguatan ini diharapkan tidak hanya memperbaiki kelembagaan organisasi, tetapi juga mendorong terbentuknya kolaborasi yang lebih solid antara pemuda, pemerintah desa, dan masyarakat dalam mewujudkan pembangunan yang partisipatif, transparan, dan akuntabel.

E. Solusi yang Ditawarkan

Untuk mengatasi berbagai permasalahan tersebut, kegiatan pengabdian masyarakat ini menawarkan beberapa solusi yang disusun secara bertahap dan terukur agar hasilnya dapat berkelanjutan bagi mitra dan masyarakat desa.

1. Pelatihan Peningkatan Kapasitas dan Literasi Pembangunan Desa
Solusi awal adalah memberikan pelatihan dan sosialisasi mengenai konsep pembangunan desa, tata kelola pemerintahan desa, serta mekanisme pengawasan pembangunan. Materi pelatihan difokuskan pada peningkatan pemahaman tentang RPJMDes, RKPDDes, dan sistem pelaporan kegiatan desa. Melalui pendekatan ini, anggota Karang Taruna diharapkan mampu membaca dan menganalisis kebijakan pembangunan dengan perspektif kritis namun konstruktif.
2. Penguatan Manajemen Organisasi dan Kepemimpinan Pemuda
Kegiatan dilanjutkan dengan pelatihan manajemen organisasi, teknik penyusunan program kerja, pelaporan kegiatan, dan komunikasi publik. Pendekatan ini bertujuan membangun struktur organisasi yang efektif,

pembagian tugas yang jelas, dan sistem dokumentasi yang tertib. Selain itu, pengurus akan dibimbing untuk memperkuat karakter kepemimpinan partisipatif dan kolaboratif dalam mengelola kegiatan Karang Taruna.

3. Pendampingan dan Simulasi Pengawasan Partisipatif

Sebagai tindak lanjut dari pelatihan, dilakukan pendampingan langsung di lapangan melalui simulasi pengawasan pembangunan desa. Tim pengabdian bersama pemerintah desa dan anggota Karang Taruna akan melakukan praktik pemantauan kegiatan pembangunan, seperti pemeriksaan transparansi dana desa, dokumentasi progres fisik, serta pelaporan hasil pengawasan. Kegiatan ini akan menjadi sarana belajar langsung bagi pemuda desa dalam menerapkan teori ke praktik nyata.

4. Pengembangan Model Kemitraan Karang Taruna–Pemerintah Desa

Untuk memperkuat hubungan kelembagaan, disusun model kemitraan formal yang mengatur peran dan mekanisme kerja sama antara Karang Taruna dan pemerintah desa. Model ini

mencakup pola komunikasi, sistem pelaporan, serta agenda kerja bersama yang berorientasi pada pengawasan dan pemberdayaan masyarakat.

5. Pemanfaatan Teknologi Informasi dalam Pelaporan dan Transparansi

Sebagai solusi inovatif, Karang Taruna akan diperkenalkan pada penggunaan teknologi digital sederhana seperti Google Form, Canva, atau Drive untuk membuat laporan kegiatan, dokumentasi, dan publikasi hasil pengawasan. Dengan cara ini, Karang Taruna dapat lebih mudah menunjukkan akuntabilitas dan transparansi dalam menjalankan fungsinya di mata masyarakat.

Melalui serangkaian solusi tersebut, diharapkan Karang Taruna di Kabupaten Barru tidak hanya meningkatkan kapasitasnya sebagai organisasi kepemudaan, tetapi juga menjadi bagian penting dalam sistem pengawasan pembangunan desa yang transparan, partisipatif, dan berkelanjutan. Peningkatan kemampuan ini akan memperkuat sinergi antara pemerintah desa dan masyarakat dalam mewujudkan pembangunan yang berpihak pada kepentingan publik serta berlandaskan prinsip keadilan sosial.

A. Sosialisasi dan Identifikasi Kebutuhan Mitra

Tahap awal kegiatan dilakukan melalui sosialisasi program kepada pemerintah desa, pengurus Karang Taruna, tokoh masyarakat, dan pemangku kepentingan lainnya. Kegiatan ini bertujuan untuk memberikan pemahaman mengenai tujuan program sekaligus mengidentifikasi kebutuhan dan permasalahan yang dihadapi mitra dalam menjalankan fungsi pengawasan pembangunan desa. Hasil identifikasi

II. METODE PELAKSANAAN PROGRAM

Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat dilaksanakan untuk meningkatkan kapasitas Karang Taruna Kabupaten Barru sebagai mitra pemerintah desa dalam fungsi pengawasan pembangunan. Metode pelaksanaan dirancang secara partisipatif melalui beberapa tahapan yang saling berkesinambungan, meliputi:

digunakan sebagai dasar penyusunan materi pelatihan dan pendampingan yang sesuai dengan kondisi lapangan.

B. Pelatihan Tata Kelola Organisasi dan Kepemimpinan Pemuda

Tahap berikutnya adalah pelatihan yang difokuskan pada penguatan kapasitas kelembagaan Karang Taruna. Materi yang diberikan meliputi tata kelola organisasi, penyusunan program kerja, administrasi organisasi, komunikasi publik, serta pengembangan kepemimpinan pemuda. Kegiatan ini bertujuan meningkatkan kemampuan pengurus dan anggota Karang Taruna dalam mengelola organisasi secara efektif dan profesional sehingga mampu menjalankan perannya sebagai mitra strategis pemerintah desa.

C. Pelatihan Pengawasan Partisipatif Pembangunan Desa

Pada tahap ini peserta diberikan pemahaman mengenai mekanisme pembangunan desa, regulasi yang mengatur pembangunan desa, serta teknik pengawasan partisipatif. Materi pelatihan mencakup pemahaman dokumen RPJMDes, RKPDDes, APBDes, teknik monitoring kegiatan pembangunan, serta penyusunan laporan hasil pengawasan. Melalui kegiatan ini, anggota Karang Taruna diharapkan mampu berpartisipasi aktif dalam mengawal proses pembangunan desa secara transparan dan akuntabel.

D. Penerapan Teknologi Informasi untuk Pelaporan dan Transparansi

Kegiatan dilanjutkan dengan pelatihan pemanfaatan teknologi informasi sebagai sarana pendukung pengawasan pembangunan desa. Peserta diperkenalkan pada penggunaan berbagai aplikasi digital seperti Google Form, Google Drive, dan Canva untuk mendokumentasikan kegiatan, menyusun laporan, serta menyebarluaskan informasi

kepada masyarakat. Tahapan ini bertujuan meningkatkan kemampuan digital anggota Karang Taruna sekaligus mendorong terwujudnya transparansi dalam pelaksanaan pembangunan desa.

E. Pendampingan dan Simulasi Pengawasan Lapangan

Setelah memperoleh materi pelatihan, peserta mengikuti kegiatan pendampingan dan simulasi pengawasan pembangunan desa secara langsung. Tim pengabdian mendampingi anggota Karang Taruna dalam melakukan pemantauan kegiatan pembangunan, mengumpulkan data lapangan, mendokumentasikan temuan, serta menyusun laporan hasil pengawasan. Pendampingan ini dilakukan untuk memastikan peserta mampu mengimplementasikan pengetahuan yang diperoleh selama pelatihan ke dalam praktik nyata.

F. Evaluasi dan Penyusunan Strategi Keberlanjutan Program

Tahap akhir kegiatan dilakukan melalui evaluasi terhadap seluruh rangkaian program yang telah dilaksanakan. Evaluasi mencakup peningkatan pengetahuan, keterampilan, dan partisipasi anggota Karang Taruna dalam fungsi pengawasan pembangunan desa. Selain itu, disusun strategi keberlanjutan program melalui pembentukan tim pemantau desa, penyusunan panduan pengawasan partisipatif, serta penguatan kemitraan antara Karang Taruna, pemerintah desa, dan perguruan tinggi. Hasil kegiatan dapat terus dimanfaatkan dan dikembangkan secara berkelanjutan setelah program pengabdian berakhir.

Setiap tahapan kegiatan Hasil disusun agar melibatkan peran aktif mitra dan menghasilkan perubahan nyata terhadap kapasitas kelembagaan dan sumber daya manusia yang dimiliki Karang Taruna.

III. PELAKSANAAN DAN HASIL KEGIATAN

Secara umum, kegiatan dilaksanakan melalui lima tahapan utama, yaitu: (1) Sosialisasi, (2) Pelatihan, (3) Penerapan teknologi, (4) Pendampingan dan evaluasi, serta (5) Keberlanjutan program. Kelima tahapan tersebut dijabarkan secara konkret sebagai berikut.

Tahap awal pelaksanaan kegiatan dimulai dengan sosialisasi program kepada seluruh pihak terkait, termasuk pemerintah desa, pengurus dan anggota Karang Taruna, tokoh masyarakat, serta unsur kecamatan yang relevan. Sosialisasi dilakukan dengan tujuan agar semua pihak memahami maksud, tujuan, dan manfaat kegiatan pengabdian yang akan dilaksanakan.

A. Tahap Sosialisasi

Tahap awal pelaksanaan kegiatan dimulai dengan sosialisasi program kepada seluruh pihak terkait, termasuk pemerintah desa, pengurus dan anggota Karang Taruna, tokoh masyarakat, serta unsur kecamatan yang relevan. Sosialisasi dilakukan dengan tujuan agar semua pihak memahami maksud, tujuan, dan manfaat kegiatan pengabdian yang akan dilaksanakan.

Pada tahap ini, tim pengabdian melakukan:

1. Koordinasi awal dengan Kepala Desa dan Ketua Karang Taruna untuk menentukan waktu, tempat, dan mekanisme kegiatan.
2. Pemaparan program kerja dan solusi yang ditawarkan, termasuk hasil identifikasi permasalahan mitra serta rencana tahapan kegiatan.
3. Diskusi partisipatif untuk menggali harapan, kendala, serta potensi lokal yang dapat

mendukung keberhasilan kegiatan.

4. Penyusunan kesepakatan kerja sama yang mencakup komitmen partisipasi mitra, pembagian peran, serta bentuk dukungan dari pihak desa.

Sosialisasi dilakukan dengan pendekatan komunikasi dialogis agar mitra merasa memiliki kegiatan ini, bukan hanya sebagai objek, tetapi sebagai subjek utama perubahan. Hasil dari tahap ini adalah terbentuknya pemahaman bersama dan dukungan penuh dari semua pihak terhadap pelaksanaan program pengabdian.



Gambar 1: Sosialisasi Kegiatan

B. Tahap Pelatihan

Tahap Tahap kedua merupakan inti kegiatan, yaitu pelatihan peningkatan kapasitas bagi pengurus dan anggota Karang Taruna. Pelatihan difokuskan pada peningkatan pengetahuan, keterampilan, dan sikap profesional dalam menjalankan fungsi organisasi dan perannya sebagai mitra pemerintah desa.

Pelatihan dilaksanakan secara tatap muka interaktif melalui metode diskusi kelompok, simulasi, dan studi kasus sesuai konteks lokal Kabupaten Barru. Adapun bentuk kegiatan pelatihan meliputi:

1. Pelatihan Tata Kelola Organisasi dan Kepimpinan Pemuda Desa
 - a. Penguatan struktur organisasi dan pembagian peran kerja.
 - b. Penyusunan rencana kerja Karang Taruna berbasis kebutuhan masyarakat desa.
 - c. Peningkatan kemampuan komunikasi publik dan kolaborasi lintas lembaga.
2. Pelatihan Partisipasi dan Pengawasan Pembangunan Desa
 - a. Pemahaman regulasi pembangunan desa (RPJMDes, RKPDes, dan APBDes).
 - b. Teknik melakukan pengawasan partisipatif berbasis data dan bukti lapangan.
 - c. Simulasi pelaporan hasil pemantauan pembangunan secara sederhana dan transparan.
3. Pelatihan Manajemen Kegiatan dan Administrasi Organisasi
 - a. Penyusunan laporan kegiatan, dokumentasi, dan publikasi hasil kerja Karang Taruna.
 - b. Pengelolaan keuangan sederhana organisasi pemuda.
 - c. Pemanfaatan teknologi digital untuk pelaporan dan transparansi

Kegiatan pelatihan ini diikuti

secara aktif oleh anggota Karang Taruna, dengan peran narasumber dari dosen, pemerintah daerah, dan praktisi pembangunan desa. Evaluasi harian dilakukan melalui refleksi dan umpan balik dari peserta untuk memastikan materi sesuai dengan kebutuhan mitra.



Gambar 2: Tahap Pelatihan

C. Tahap Keberlanjutan Program

Agar kegiatan tidak berhenti setelah program pengabdian selesai, maka disusun strategi keberlanjutan program (*sustainability plan*) dengan beberapa langkah konkret, yaitu:

1. Pembentukan Tim Pemantau Karang Taruna Desa, yang bertugas melakukan pengawasan rutin terhadap kegiatan pembangunan serta melaporkan hasilnya kepada pemerintah desa dan masyarakat.
2. Kemitraan berkelanjutan dengan perguruan tinggi dan pemerintah daerah, melalui program pendampingan lanjutan, penelitian terapan, dan kegiatan pelatihan tematik berikutnya.

3. Replikasi program di desa lain, dengan menjadikan Karang Taruna binaan sebagai model percontohan bagi Karang Taruna di desa tetangga.
4. Penyediaan panduan tertulis (buku saku digital) tentang tata cara pengawasan pembangunan desa berbasis partisipatif, sebagai bahan rujukan bagi anggota baru Karang Taruna.

Dengan adanya keberlanjutan ini, diharapkan Karang Taruna mampu secara mandiri menjalankan perannya sebagai mitra pemerintah desa dalam jangka panjang, bahkan setelah kegiatan pengabdian formal berakhir.

IV. KESIMPULAN

Pelaksanaan program Peningkatan Kapasitas Karang Taruna Kabupaten Barru sebagai Mitra Pemerintah Desa dalam Fungsi Pengawasan Pembangunan telah memberikan dampak positif terhadap peningkatan peran pemuda dalam pengawasan pembangunan desa. Melalui serangkaian pelatihan, pendampingan, dan penguatan koordinasi dengan Pemerintah Desa, Karang Taruna mampu memahami tugas, mekanisme, dan teknik dasar dalam melakukan pengawasan yang lebih partisipatif, transparan, dan akuntabel.

Kegiatan ini menunjukkan bahwa Karang Taruna memiliki potensi strategis sebagai agen kontrol sosial di tingkat desa. Dengan peningkatan kapasitas yang tepat, Karang Taruna tidak hanya menjadi organisasi kepemudaan yang aktif dalam kegiatan sosial, tetapi juga dapat berperan dalam memastikan pembangunan desa berjalan sesuai rencana, tepat sasaran, serta bermanfaat bagi masyarakat.

Selain itu, program ini berhasil memperkuat sinergi antara Pemerintah

Desa, lembaga desa, dan Karang Taruna, yang berkontribusi pada terciptanya tata kelola pembangunan desa yang lebih terbuka dan responsif. Namun demikian, keberlanjutan program ini sangat bergantung pada dukungan regulasi, pendanaan, serta komitmen bersama untuk terus memperkuat kapasitas pemuda di tingkat desa.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis menyampaikan apresiasi dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Rektor Universitas Negeri Makassar, Lembaga Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat (LP2M) Universitas Negeri Makassar, Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum, Ketua Karang Taruna Kabupaten Barru, serta seluruh mitra kegiatan dan pihak-pihak yang telah memberikan dukungan, bantuan, dan kerja sama selama pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini. Ucapan terima kasih juga disampaikan kepada seluruh anggota Karang Taruna yang telah berpartisipasi aktif dalam setiap tahapan kegiatan sehingga program dapat terlaksana dengan baik. Semoga segala bentuk dukungan dan kontribusi yang telah diberikan mendapatkan balasan yang setimpal dari Tuhan Yang Maha Esa serta menjadi amal kebaikan yang bermanfaat bagi masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Amira, S. (2022). *Pengelolaan Dana Desa dalam Meningkatkan Pembangunan Ekonomi Masyarakat Desa Cilellang Kecamatan Mallusetasi Kabupaten Barru*. IAIN parepare.
- Asmiani, N., Yusuf, F. N., & others. (2024). Peningkatan Kapasitas Karang Taruna Desa Pattappa Dalam Pembuatan Kerajinan

- Tangan Berbasis Sumber Daya Alam Lokal. *Sipakatau: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 2(2), 21–24.
- Astuti, A., Saenab, S., & Rezeky, A. S. (2026). REPOSISI PERAN KARANG TARUNA DALAM TATA KELOLA DESA: DARI PELAKSANA KEGIATAN MENJADI PENGELOLA DATA BERBASIS KOMUNITAS. *JURNAL AKADEMIK PENGABDIAN MASYARAKAT*, 4(3), 249–260.
- BPS Barru. (2023). *Kabupaten Barru dalam Angka 2023*. BPS Kabupaten Barru.
- Hidayatulloh, H. (2022). *Implementasi Peraturan Menteri Sosial No. 25 Tahun 2019 Pasal 6 Tentang Tugas Karang Taruna Perspektif Fiqh Siyasah Dusturiyah (Studi Pada Karang Taruna Pekon Pardasuka Timur Kecamatan Pardasuka Kabupaten Pringsewu)*. UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG.
- Istiana, R. A. (2024). Meningkatkan Partisipasi Pemuda dalam Pembangunan Desa Melalui Optimalisasi Peran Karang Taruna (Studi Kasus Pada Karang Taruna RW 02 Desa Singajaya, Kec. Cihampelas, Kab. Bandung Barat). *Proceedings Uin Sunan Gunung Djati Bandung*, 4(5), 326–335.
- Junaid, I., Dewi, W. O., Said, A., & Hanafi, H. (2022). Pengembangan Desa Wisata Berkelanjutan: Studi Kasus di Desa Paccekke, Kabupaten Barru, Indonesia. *Journal of Regional & Rural Development Planning/Jurnal Perencanaan Pembangunan Wilayah Dan Perdesaan*, 6(3).
- Mukhlis, S., & others. (2025). *Dari Desa Untuk Desa: Dinamika Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Lokal*. Ganesha Kreasi Semesta.
- Prasetyo, D. D. (2025). Penguatan Kapasitas Kelembagaan Karang Taruna dalam Pemberdayaan Ekonomi Kreatif Berbasis Potensi Lokal di Kecamatan Turi, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. *Lentera Salam Institute*, 2(1), 28–36.
- Ramadhani, A., Harianja, H. E., Apriliani, D., Mentari, A., & Sulaksono, T. P. (2025). Karang Taruna Kemiling sebagai Pilar Integrasi Kepemudaan dalam Inovasi Sosial dan Pemberdayaan Ekonomi Guna Membangun Masyarakat di Era Digital. *Jurnal Multidisiplin Ilmu Akademik*, 2(3), 519–530.